

**JURNAL ILMIAH PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN**

Volume 5, Nomor 1, Halaman 33-41  
<http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk>

p-ISSN: 2528-0767  
 e-ISSN: 2527-8495

**UPAYA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN  
 DALAM MENTRANSFORMASIKAN NILAI-NILAI PANCASILA PADA KADER**

*THE EFFORTS OF DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN PARTY REGIONAL BOARD  
 STRUGGLE IN TRANSFORMATION PANCASILA VALUES ON CADRE*

**Arif Prasetyo Wibowo\***

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
 Universitas Muhammadiyah Malang  
 Jalan Bendungan Sutami Nomor 188, Malang 65145 Indonesia

**INFO ARTIKEL**

***Riwayat Artikel:***

Diterima : 17 Maret 2020

Disetujui : 12 April 2020

***Keywords:***

Pancasila values, political  
 education, political parties

***Kata Kunci:***

nilai-nilai Pancasila, pendidikan  
 politik, partai politik

***\*) Korespondensi:***

E-mail: [arifpwibowo@umm.ac.id](mailto:arifpwibowo@umm.ac.id)

**Abstract:** this study discussed the purpose of political education for the Regional Leadership Council of the Indonesian Democratic Party of struggle in West Java Province, the relationship of the party's platform to the values of Pancasila, and the approaches, methods, and media used by the party in growing Pancasila values to its cadres. This study used a qualitative approach with case studies. Data collection was done through observation, interviews, and documentation. Data analysis used interactive analysis. The results of this study were political education carried out by political parties to their cadres was a process of political socialization to improve the quality of human resources owned by the West Java Demokrasi Indonesia Perjuangan Party Regional Board. The relationship between the party platform and Pancasila values was a process of political education in which cadres were given new knowledge, understanding, and experience in transforming their political values and orientation towards the expected ideal system. The approaches, methods, and media carried out by political parties were carried out through the recruitment of political parties to ensure the sustainability and preservation of political parties.

**Abstrak:** kajian ini membahas tujuan pendidikan politik bagi Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Barat, implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai platform partai, dan pendekatan, metode, serta media yang digunakan oleh partai dalam menumbuhkan nilai-nilai Pancasila kepada para kadernya. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis interaktif. Hasil dari kajian ini yaitu pendidikan politik bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dewan Pengurus Wilayah. Nilai-nilai Pancasila sebagai platform partai diimplementasikan melalui berdaulat dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya. Pendekatan yang digunakan oleh partai dalam menumbuhkan nilai-nilai Pancasila kepada para kadernya adalah pendekatan terbuka. Metode yang digunakan adalah ceramah dan *role playing*. Media yang digunakan adalah video dan foto Bung Karno dan ketua umum dewan pimpinan pusat.

## PENDAHULUAN

Pancasila merupakan *grundsnorm* yang berfungsi merekatkan aneka ragam kelompok masyarakat kepulauan yang besar jumlahnya, berbeda-beda, dan hidup di kawasan yang luas agar mampu berdiri tegak di wilayah negara kesatuan bernama Indonesia: *the country of thousands impossibilities*. Secara filosofis, hakikat Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional harus didasarkan pada hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.

Oleh karena itu, negara dalam melakukan pembangunan nasional harus kembali pada dasar-dasar hakikat manusia monopluralis. Unsur-unsur hakikat manusia monopluralis meliputi susunan kodrat manusia, rohani (jiwa) dan raga, sifat kodrat manusia makhluk individu dan makhluk sosial, serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa (Kaelan, 2002). Oleh karena pembangunan nasional sebagai upaya praksis untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka pembangunan harus didasarkan pada paradigma hakikat manusia monopluralis tersebut.

Di bidang politik, Alfian (1986) menjelaskan bahwa pembangunan dan pembaruan politik mengandung dua pengertian pokok yang saling berkaitan. Pengertian pertama ialah adanya suatu sistem ideal yang ingin dicapai. Kedua ialah penilaian bahwa sistem politik yang tengah berlaku masih mempunyai kelemahan-kelemahan, karena itu perlu diperbaiki atau diperbarui. Bagi masyarakat Indonesia yang majemuk ini sistem politik ideal yang diinginkan itu ialah demokrasi Pancasila. Pembangunan serta pengembangan harus didasarkan pada dasar ontologis manusia (Kaelan, 2002). Hal ini didasarkan pada kenyataan objektif bahwa manusia adalah sebagai subjek negara. Oleh karena itu kehidupan politik dalam negara harus benar-benar untuk merealisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia.

Namun demikian, terdapat beberapa masalah yang menghambat jalannya proses percepatan pembangunan nasional terlebih di bidang politik. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang menjelaskan telah terjadi orientasi gerakan kelompok keagamaan Islam beraliran radikal di era

desentralisasi demokrasi, dari basis isu islamisme (penegakan syariat Islam) ke arah premanisme (penguasaan sumber daya ekonomi) yang patut dijadikan perhatian bersama (Kafid, 2016). Dalam hasil survei yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia pada tahun 2005, publik yang pro-Pancasila angkanya mencapai 85,2% tetapi pada tahun 2010 menjadi 79,4%, tahun 2015 angkanya menjadi 79,4%, dan di tahun 2018 menjadi 75,3% (Hidayat, 2018). Dalam waktu 13 tahun, publik yang pro-Pancasila mengalami penurunan sebanyak 10% sedangkan publik yang pro-NKRI bersyariah Islam mengalami kenaikan sebanyak 9%.

Survei terbaru yang dilakukan oleh *Cyrus Network* pada tanggal 22 sampai 28 Juli 2019 dengan melibatkan 1.230 responden di 34 provinsi di Indonesia menunjukkan hanya 70,3% responden yang beragama Islam setuju dan menerima Pancasila sebagai dasar negara. Sisanya 4,7% responden mendukung terbentuknya khilafah dan 13% responden menyatakan Indonesia harus berlandaskan syariat Islam karena merasa Islam adalah agama mayoritas. *Managing Director Cyrus Network* mengemukakan, hasil survei tersebut perlu mendapatkan perhatian serius dan menjadi pekerjaan rumah bersama dalam menanggapi jumlah yang cukup besar terkait masih adanya sikap menolak ideologi negara tersebut (Cyrus, 2019). Maka dari itu, diperlukan usaha-usaha agar nilai-nilai Pancasila diterima dan didukung sepenuhnya oleh seluruh masyarakat sebagai dasar demokrasi di Indonesia.

Sebagai *das sollen*, usaha-usaha menemukan stelsel dan mekanisme demokrasi yang cocok bagi masyarakat Indonesia sangat dihargai (Manan dan Harijanti, 2014). Namun, pada tataran *das sein* bukan sesuatu yang mudah dijabarkan. Hal itu disebabkan perpaduan-perpaduan konseptual ternyata tidak disertai dengan penjabaran mengenai *rule of the game* yang juga menggambarkan perpaduan tersebut. Selain itu, tingkah laku politik turut memberikan kontribusi yang serius. Akibatnya, para pelaku demokrasi bebas menciptakan *rule of the game* menurut paham dan pengetahuan yang memengaruhi diri mereka serta keinginan-keinginan politik yang hendak dicapai.

Kehidupan berpolitik bangsa Indonesia yang diwakili oleh tata kelola partai politik masih jauh dari keadaan yang ideal. Pertama, partai politik

yang menjadi salah satu pilar utama kehidupan berdemokrasi dan berpolitik masih harus terus berproses dalam menjalankan amanat sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Kedua, partai politik belum menjadikan pendidikan politik sebagai sorotan utama.

Pendidikan politik seakan tenggelam di antara hiruk-pikuk perebutan kekuasaan (Saputro, 2015). Eksklusivitas dalam rekrutmen dan seleksi kandidat merupakan modus korupsi demokratis yang kerap terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah di Indonesia (Irham, 2016). Sentralisme partai politik yang mengabaikan kontrol anggota partainya dan pertimbangan publik dalam rekrutmen calon kepala daerah telah menumbuhkan korupsi demokratis di kalangan kandidat dan elite partai politik.

Mengenai pendidikan politik yang seharusnya dilakukan oleh partai politik, Mariana (2011) menjelaskan partai politik sejatinya memiliki tugas lebih dalam melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan partai politik telah menerima bantuan keuangan dari APBN/APBD sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Akan tetapi, karena pemahaman mengenai pendidikan politik sangat lentur dan tidak adanya pertanggungjawaban untuk substansinya maka efektivitas program tersebut belum teruji. Atas dasar pemikiran di atas, tulisan ini akan membahas: (a) tujuan pendidikan politik bagi kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Barat, (b) implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai platform partai, dan (c) pendekatan, metode, serta media yang digunakan oleh partai dalam menumbuhkan nilai-nilai Pancasila kepada para kadernya.

## METODE

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Pemilihan pendekatan kualitatif dikarenakan permasalahan yang dikaji pada Dewan Pengurus Wilayah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Barat membutuhkan sejumlah data lapangan yang sifatnya kontekstual dan aktual. Selain itu pendekatan kualitatif menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden sehingga dapat

disimpulkan pendekatan kualitatif memiliki sifat fleksibilitas yang tinggi, artinya memudahkan peneliti untuk menyesuaikan situasi yang berubah-ubah dalam penelitian ini. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tujuan Pendidikan Politik bagi Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Mentransformasikan Nilai-Nilai Pancasila

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, pendidikan politik yang dilakukan oleh partai kepada para kadernya merupakan suatu kegiatan edukatif yang dilakukan oleh partai untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman para kader terhadap orientasi nilai-nilai perjuangan dari partai politik. Hal ini dapat dilihat dari pendidikan politik yang dilakukan secara sistematis, berjenjang, dan berkesinambungan oleh partai politik.

Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Barat melakukan proses pendidikan politik kepada para kadernya dengan melakukan tiga jenjang administrasi, yaitu kaderisasi tingkat pratama, kaderisasi tingkat madya, dan kaderisasi tingkat utama atau nasional. Kegiatan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik kepada para kadernya merupakan bagian dari pendidikan sosial pada umumnya.

Kegiatan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik kepada para kadernya tersebut dapat dikatakan merupakan upaya edukatif yang intensional, disengaja, dan sistematis untuk membentuk individu sadar politik, dan mampu menjadi pelaku politik yang bertanggung jawab secara etis/moril dalam mencapai tujuan-tujuan politik (Kartono, 2009). Dalam proses pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik kepada para kadernya, partai politik memberikan pemahaman, pengetahuan, dan pengalaman yang berbeda-beda dalam setiap jenjang kaderisasi (Ruslan, 2000). Namun dengan tujuan akhir yang sama, yakni peningkatan sumber daya manusia yang berkarakter sesuai dengan watak dari partainya. Kegiatan pendidikan politik yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Barat merupakan bentuk

upaya partai dalam melakukan perubahan cara berpikir dan peningkatan partisipasi kader dalam kegiatan politik yang dilakukan oleh partai.

Dari kegiatan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik tersebut, para kader merasa mendapatkan kesadaran dan pemahaman baru mengenai arti penting berkontribusi dalam kegiatan politik. Dalam tataran praksis para kader mengerti dan memahami hal-hal yang perlu dan harus dilakukan dalam berkontribusi serta terlibat aktif di kegiatan politik. Kontribusi aktif yang dilakukan para kader dalam kegiatan politik tersebut dimaknai sebagai bekal utama untuk melakukan kegiatan-kegiatan politik, sehingga para kader dapat menyosialisasikan kembali nilai-nilai yang diperolehnya dari kaderisasi partai kepada hal layak ramai.

Kegiatan pendidikan politik yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dapat dikatakan sebagai pendidikan politik dalam arti ketat. Kegiatan tersebut merupakan usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka menghayati dan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun dengan sungguh-sungguh. Proses sosialisasi yang dilakukan oleh kader kepada masyarakat yang lebih umum dalam kontribusinya melakukan perubahan terhadap nilai-nilai yang dianggapnya ideal merupakan pendidikan politik dalam arti kata yang longgar (Alfian, 1986), yaitu bagian langsung dari kehidupan masyarakat sehari-hari, disenangi atau tidak, diketahui atau tidak, disadari atau tidak, hal itu dialami oleh anggota-anggota masyarakat baik penguasa maupun orang awam.

Pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik tersebut berfungsi untuk memperbaiki sistem yang berlaku agar segera tercapainya masyarakat adil dan makmur sesuai dengan visi dan misi yang dimiliki setiap partai. Proses pendidikan politik yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Barat memiliki tiga fungsi.

Pertama, media pembaharuan rumusan dan penyebarluasan ideologi, teori pergerakan, dan taktik perjuangan partai. Kedua, teradaptasikannya rancangan kebijakan negara yang sejalan dengan Trisakti ajaran Bung Karno. Ketiga, terjalannya

hubungan yang erat antara kader partai dengan masyarakat sehingga kader mampu menggalang dan memimpin pergerakan rakyat.

Berdirinya partai-partai politik dalam suatu masyarakat merupakan media pendidikan politik yang sesungguhnya. Apabila warga negara memiliki pemahaman mengenai nilai-nilai politik, maka dengan sendirinya akan memotivasi warga negara tersebut untuk ikut aktif berpartisipasi ke dalam kegiatan politik (Soeprapto, Susilasti, & Suparno, 2014). Peran partai politik menjadi lebih besar, tidak hanya sebagai alat pemilihan umum tetapi juga ikut menentukan serta mengartikulasikan sikap politik bagi sekelompok masyarakat yang berdampak kepada sistem politik di suatu negara. Hal ini yang membuat peran partai politik menjadi besar pengaruhnya dalam pendidikan politik (Ruslan, 2000). Melalui pendidikan politik yang dilakukan oleh berbagai lembaga formal dan informal tersebut warga negara diberikan pemahaman untuk mengubah realitas politik menjadi sistem politik yang ideal menurut arah pembangunan bangsa, yang dapat ditandai dengan kebudayaan politik baru.

### **Implementasi Nilai-Nilai Pancasila sebagai Platform Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan**

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjadikan Pancasila 1 Juni 1945 sebagai platform atau asas perjuangan partai, dengan jati diri kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial serta watak gotong royong, demokratis, merdeka, pantang menyerah dan progresif revolusioner. Dalam proses pendidikan politik yang dilakukannya kepada para kader, dijelaskan secara keseluruhan proses panjang yang dijalani bangsa Indonesia dalam menemukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam kehidupan keorganisasiannya tidak pernah membedakan antara Pancasila 1 Juni 1945 dan Pancasila 18 Agustus 1945. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan hanya menjadikan Pancasila 1 Juni 1945 sebagai roh perjuangan partai sedangkan dalam praksisnya menjadikan Trisakti ajaran Bung Karno sebagai pedoman perjuangan program kerja partai.

Platform partai politik tersebut merupakan ide mengenai masyarakat dan negara yang ingin



disusun, pemerintahan yang akan diselenggarakan, dan yang diperjuangkan terus menerus oleh organisasi yang dinamakan partai politik itu (Setyadarmodjo, 2000). Pergantian kepemimpinan mengubah gaya kepemimpinan pada tingkat tertentu, tetapi tidak mengubah prinsip dan program dasar partai karena ideologi partai sudah dirumuskan secara konkret dan partai ini terorganisasikan secara ketat (Surbakti, 2007). Platform atau asas yang dimaksud ialah seperangkat nilai politik yang dirumuskan secara konkret dan sistematis dalam bentuk program-program kegiatan yang pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh aparat partai.

Penyampaian materi ajar dalam kegiatan pendidikan politik yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Barat kepada para kadernya merupakan sebuah usaha berpikir secara rasional (bernalar), sistematis (runtut), radikal (mendalam), komprehensif (menyeluruh), dan universal (objektif/intersubjektif) tentang segala sesuatu (Soedarso, 2006). Platform yang dimiliki oleh partai politik tersebut merupakan pondasi awal dalam membentuk sistem kehidupan kepartaian yang dimilikinya, sebab sistem tersebut merupakan kumpulan dari subsistem baik secara fisik maupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerjasama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu (Susanto, 2013). Materi ajar yang diberikan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Barat kepada para kader adalah materi ajar mengenai Trisakti ajaran Bung Karno yang dibagi kedalam tiga pembahasan yaitu, Trisakti: Berdaulat dalam Politik, Trisakti: Berdikari dalam Bidang Ekonomi, dan Trisakti: Berkepribadian dalam Budaya.

Pemberian materi ajar dalam proses pendidikan politik yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Barat kepada para kadernya ini diberikan oleh para kader partai yang telah menempuh jenjang kaderisasi Guru Kader di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Akan tetapi, meskipun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyebutkan platform atau asas partai politiknya adalah Pancasila 1 Juni 1945 dan melakukannya dengan cara Trisakti ajaran Bung Karno, namun dalam Anggaran Dasar/Anggaran

Rumah Tangga-nya mendudukan Pancasila sebagai tujuan akhir dalam pembentukan partai politik, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Transformasi yang dilakukan oleh partai politik tersebut dalam mengejawantahkan ideologi Pancasila tidak perlu mendapat kekhawatiran. Karena suatu ideologi perlu mengandung tiga dimensi penting dalam dirinya agar dapat dipelihara relevansinya yang tinggi/kuat terhadap perkembangan aspirasi masyarakatnya dan tuntutan perubahan zaman, yang pada kualitasnya dapat dilihat melalui tiga dimensi yang saling berkaitan, saling mengisi, dan saling memperkuat untuk menjadikan suatu ideologi tersebut kenyal dan tahan uji dari masa ke masa (Alfian, 1991). Ketiga dimensi itu adalah dimensi realita, dimensi idealisme, dan dimensi fleksibilitas (pengembangan).

Dimensi realita, ideologi itu mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai yang riil hidup di dalam masyarakatnya, terutama pada waktu ideologi tersebut lahir, sehingga mereka betul-betul merasakan dan menghayati bahwa nilai-nilai dasar itu adalah milik bersama. Dengan begitu nilai-nilai dasar ideologi itu tertanam dan berakar di dalam masyarakatnya. Pancasila mengandung dimensi realita ini di dalam dirinya.

Dimensi idealisme, suatu ideologi perlu mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui idealisme atau cita-cita yang terkandung dalam ideologi yang dihayati, suatu masyarakat atau bangsa mengetahui ke arah mana mereka ingin membangun kehidupan bersama. Idealisme atau cita-cita tersebut seyogyanya berisi harapan-harapan yang masuk akal, bukan lambungan angan-angan yang sama sekali tidak mungkin direalisasikan.

Oleh karena itu dalam suatu ideologi yang tangguh biasanya terjalin kaitan yang saling mengisi dan saling memperkuat antara dimensi realita dan dimensi idealisme yang terkandung di dalamnya (Hasibuan & Sulistyono, 2018). Dengan begitu ideologi tersebut akan berhasil menjadikan dirinya sebagai landasan atau dasar (melalui dimensi realita) dan sekaligus tujuan (melalui dimensi idealisme) dalam membangun berbagai

bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemahaman dan penghayatan tentang Pancasila sebagai ideologi memang mengandung hal yang demikian itu, yaitu sebagai ideologi yang melandasi dan sekaligus menjadi tujuan kehidupan bersama. Pancasila bukan saja memenuhi dimensi kedua dari suatu ideologi, tetapi sekaligus juga memenuhi sifat berkaitan yang saling mengisi dan saling memperkuat antara dimensi pertama (dimensi realita) dengan dimensi kedua (dimensi idealisme).

Dimensi fleksibilitas/dimensi pengembangan hanya mungkin dimiliki secara wajar dan sehat oleh suatu ideologi yang terbuka atau ideologi yang demokratis. Karena ideologi yang terbuka atau demokratis justru menemukan, meletakkan atau bahkan mempertaruhkan relevansi atau kekuatannya pada keberhasilannya merangsang masyarakatnya untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Melalui pemikiran-pemikiran baru tentang dirinya, ideologi itu mempersegar dirinya, memelihara, dan memperkuat relevansinya dari waktu ke waktu. Jadi, ideologi terbuka itu bersifat demokratis, memiliki dinamika internal yang mengundang dan merangsang warganya untuk meyakinkannya dan mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tanpa khawatir atau menaruh curiga akan kehilangan hakikat ideologi tersebut.

Walaupun partai politik memiliki platformnya masing-masing, namun dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga setiap partai politik mendudukkan Pancasila sebagai tujuan akhir dalam pembentukan partai politik, yakni mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Implikasi platform Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam proses perwujudan cita-cita nasional dilakukan dengan cara Trisakti ajaran Bung Karno yakni berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

### **Pendekatan, Metode, dan Media Pendidikan Politik yang Digunakan oleh Partai Politik dalam Menumbuhkan Nilai-Nilai Pancasila Kepada Kader**

Dalam melaksanakan program pendidikan politiknya, setiap partai politik memiliki pendekatan,

metode, dan medianya masing-masing. Pendekatan, metode, dan media yang digunakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang ideal mengenai arah dan tujuan berdirinya partai politik. Hal ini menjadi penting dan perlu dilakukan agar memiliki kesamaan gerak langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkannya.

Dari pendidikan politik tersebut akan membentuk pewarisan kebudayaan dari generasi awal ke generasi berikutnya, yang pada akhirnya akan berhubungan dengan pembangunan politik dalam kebudayaan bangsa. Pendidikan politik berkaitan dengan pembudayaan sistem politik yang dilandasi norma dasar yang terkandung dalam ideologi nasional dan konstitusi negara, dengan mendayagunakan kelembagaan dan proses pendidikan secara sistematis dan terintegrasi (Sunatra, 2016). Secara normatif dan praktis, proses pembudayaan dikembangkan berdasarkan kepada komponen-komponen yang berlaku dan tatanan nilai sosial budaya dan pandangan hidup bangsa (*weltanschauung*).

Pendekatan, metode, dan media yang dilakukan oleh setiap partai politik sekaligus merupakan pelaksanaan dari rekrutmen partai politik dalam menjalankan fungsinya. Agar partai politik dapat menjaga eksistensinya, partai politik membutuhkan banyak anggota. Oleh karena itu rekrutmen partai politik menjadi suatu kebutuhan yang perlu dilakukan untuk menjamin keberlangsungan serta kelestarian partai politik. Dengan adanya rekrutmen partai politik sekaligus menjadi sarana internal partai dalam meningkatkan sumber daya kader memberikan manfaat ketika dalam momentum pemilihan pimpinan partai, partai politik memiliki banyak kader yang dapat diseleksi.

Pendekatan yang dilakukan oleh setiap partai bersifat terbuka, dalam arti setiap partai memperbolehkan siapa saja warga negara Republik Indonesia untuk menjadi anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Walaupun bersifat terbuka untuk umum, setiap partai politik memiliki segmentasi sendiri dalam melakukan pendekatan pada proses pendidikan politik. Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Barat melakukan pendekatannya kepada kelompok-kelompok nasionalis seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang merupakan

fusi dari Partai Nasional Indonesia (PNI), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Musyawarah Rakyat Banyak (MURBA), Partai Kristen Indonesia (PARKINDO) dan Partai Katolik. Adapun kelompok-kelompok lain selain keluarga besar dari sejarah berdirinya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah masyarakat yang mengerti serta memahami Pancasila 1 Juni 1945 dan ajaran Bung Karno.

Dari pendekatan yang dilakukan oleh partai politik dalam melakukan rekrutmen partai dapat dikatakan sebagai kelompok pertama yang melakukan penyadaran. Hal ini sejalan dengan pendapat Verba yang menyatakan bahwa *“The primary group (small, face-to-face group), by fostering group consciousness (shared opinions, attitudes, values), has a powerful influence on the individual. The primary group is instrumental in the mobilization of political behavior because such groups are the locus of political decision making in an organization as well as the transmission points for political communications”* (Berger, 1997). Partai politik merupakan organisasi yang tepat untuk melakukan transmisi dalam suatu komunikasi politik.

Metode yang digunakan dalam proses pendidikan politik yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Barat adalah dengan metode ceramah dan *role playing*. Metode ini digunakan dalam setiap proses pendidikan politik yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Barat. Ditingkat daerah, Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Barat melakukan proses pendidikan politik yang disebut kaderisasi tingkat madya dengan lama waktu tujuh hari enam malam. Dengan waktu tujuh hari enam malam tersebut para kader diberikan materi ajar ideologi partai, kepemimpinan dalam partai politik, standarisasi kesekretariatan partai, organisasi manajemen dan kepemimpinan, parpol dalam sejarah perjuangan bangsa dan sejarah PDI Perjuangan, pemetaan politik dan stratifikasi sosial, pengantar ideologi Pancasila 1 Juni 1945, manajemen penggalangan massa, AD/ART, piagam perjuangan, dan haluan perjuangan partai, strategi dan teknik pemenangan pilkada, strategi penggalangan massa I, strategi

penggalangan massa II, Trisakti: berdaulat dalam politik, Trisakti: berdikari di bidang ekonomi, trisakti: berkepribadian dalam kebudayaan, ideologi partai dan partai ideologi.

Setelah para kader mendapatkan pembekalan melalui mata ajar yang diberikan oleh Dewan Pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Barat, para kader masuk ketahapan selanjutnya, yakni turun ke lapangan dengan menggunakan metode *role playing*. Setiap kader secara berkelompok atau individu ditempatkan bersama masyarakat untuk merasakan, melihat, dan memaknai kehidupan dari masyarakat yang mereka tinggali. Masyarakat yang dipilih sebagai tempat tinggal oleh Dewan Pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Barat biasanya masyarakat pinggiran seperti petani, nelayan, dan buruh. Dalam masa tinggal bersama masyarakat tersebut, setiap kader baik secara kelompok atau individu diberi tugas dan harus dilaporkan kembali kepada badan pendidikan dan latihan (badiklat) Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang kemudian akan dinilai dan dievaluasi.

Metode yang dilakukan oleh partai politik dalam proses pendidikan politiknya dapat membuat anggota partai politik memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakatnya (Su'ud, 2014), sehingga pola dan proses dimana individu terlibat dalam pengembangan dan pembelajaran politik, membangun hubungan khusus mereka dengan konteks politik dimana mereka tinggal (Pfaff, 2009). Gilbert berpendapat bahwa makna pendidikan politik sebenarnya berbeda dengan makna yang diberikan pada politik (Yuen & Leung, 2009). Ketika politik difafsirkan sebagai pemerintahan formal, pendidikan politik berfokus pada pembelajaran tentang bagaimana sistem pemerintahan bekerja. Ketika politik diambil sebagai penyelesaian konflik, pendidikan politik bertujuan untuk mengajarkan bagaimana kelompok-kelompok kepentingan mengejar tujuan mereka. Ketika politik berarti operasi kekuasaan, pendidikan politik akan menganalisis proses kekuasaan di institusi politik, ekonomi, dan institusi lainnya.

Adapun media yang digunakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Barat menggunakan



video dan gambar Bung Karno serta Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Sukarnoputri. Penayangan video dan gambar tersebut diberikan ketika proses kaderisasi dilakukan oleh Dewan Pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Barat untuk memberikan pemahaman dan pengertian perjuangan yang dilakukan oleh Bung Karno sebagai Bapak Bangsa, sedangkan gambar dan video Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat diberikan agar setiap kader mengetahui program apa saja yang sedang dan ingin dicapai oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Media yang dilakukan oleh partai politik dalam proses pendidikan politik kepada para kadernya tersebut bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik, membentuk dan menumbuhkan kesadaran politik, dan membentuk dan menumbuhkan kemampuan dalam berpartisipasi politik agar menjadi partisan politik dalam bentuk yang positif (Ruslan, 2000). Kepribadian politik dapat terbentuk hanya dengan metode-metode sosialisasi atau pendidikan politik itu sendiri. Faktor personal juga mampu memengaruhi kegiatan politik. Faktor personal dibagi menjadi tiga, yaitu tingkat partisipasi warga negara dalam aktivitas politik yang bergantung pada tingkat perhatiannya, partisipasi politik bergantung pada tingkat kemampuan dan kecakapan yang dimiliki oleh individu, keyakinan individu akan kemampuannya dalam mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah.

Tiga faktor penting yang akan memberikan kontribusi kepada pengembangan kepribadian politik tersebut antara lain: (1) sistem politik yang dilihat dari format dan fungsinya akan memainkan peran penting dalam menentukan orientasi-orientasi politik pada seorang individu, (2) berbagai bentuk pengalaman dan hubungan yang dibuat oleh beberapa individu dan kelompok lain, dan (3) kemampuan dan kecakapan-kecakapan khusus. Kesadaran politik dapat dicapai melalui arahan politik secara langsung yang dapat dilakukan melalui arahan formal dan non formal, penjelasan-penjelasan politik, usaha-usaha bimbingan, dan pengajaran politik langsung yang dilakukan oleh para pemikir dan pemimpin-pemimpin politik. Pengalaman politik juga didapatkan melalui partisipasi politik. Kesadaran yang muncul

melalui belajar mandiri, dapat diperoleh melalui media massa, buku-buku politik, dan berbagai peristiwa dan perkembangan politik yang terjadi. Kesadaran yang lahir dari dialog-dialog kritis yang ditambah dengan dua metode, *apprenticeship* dan generalisasi. Partisipasi politik dapat dipengaruhi melalui keyakinan agama yang diyakini dan diimani oleh seorang individu. Jenis kultur politik atau bentuk nilai dan keyakinan akan memengaruhi kegiatan politik. Karakteristik lingkungan politik dalam masyarakat yang menghormati supremasi hukum dan kebebasan politik, sistem politiknya multipartai, mengakui hak kritik dan partisipasi rakyat, dan banyak memberikan kesempatan kepada rakyat akan memengaruhi masyarakat untuk ikut melakukan partisipasi dalam kehidupan bernegara.

## SIMPULAN

Pendidikan politik bagi kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merupakan upaya edukatif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Implementasi nilai-nilai Pancasila pada platform partai diwujudkan dengan berdaulat dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya. Pendidikan politik menggunakan pendekatan terbuka dengan metode ceramah dan *role playing*. Media yang digunakan adalah foto video dan foto Bung Karno dan ketua umum dewan pimpinan partai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfian. (1986). *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia Kumpulan Karangan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Alfian. (1991). Pancasila Sebagai Ideologi dalam Kehidupan Politik. Dalam Oesman, O., & Alfian, *Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara* (1991). Jakarta: BP-7 Pusat.
- Berger, K. J. (1997). *The Political Behavior of California Community College Nursing Faculties in Response to Budget Cutbacks, 1982-1987*. California: University of San Diego.
- Cyrus: Hanya 70 persen Responden Muslim Setuju Pancasila. (9 Agustus 2019). *CNN Indonesia*. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190809164210-20-419916/>



- cyrus-hanya-70-persen-responden-muslim-setuju-pancasila.
- Hasibuan, A. S. & Sulistyono, D. (2018). Peranan Ideologi dalam Integrasi Nasional. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 1(1), 1-10.
- Hidayat, F. (17 Juli 2018). Survei LSI: Pro-Pancasila Turun 10%, Pro-NKRI Bersyariah Naik 9%. *DetikCom*. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4119173/survei-lsi-pro-pancasila-turun-10-pro-nkri-bersyariah-naik-9>.
- Mariana. (Agustus 2011). Buat Standar Pendidikan Politik! *Pikiran Rakyat*, hlm. 2.
- Irham, M. A. (2016). Korupsi Demokratis dalam Partai Politik: Studi Kasus Penyelenggaraan Pemiluakada Lampung. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 7(1), 63-84.
- Kaelan. (2002). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kafid, N. (2016). Dari Islamisme ke “Premanisme”: Pergeseran Orientasi Gerakan Kelompok Islam Radikal di Era Desentralisasi Demokrasi. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 21(1), 57-79.
- Kartono, K. (2009). *Pendidikan Politik Sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*. Bandung: Mandar Maju.
- Manan, B., & Harijanti, S. D. (2014). Artikel Kehormatan: Saat Rakyat Bicara: Demokrasi dan Kesejahteraan. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 1-18.
- Pfaff, N. (2009). Youth Culture as a Context of Political Learning How Young People Politicize Amongst Each Other. *Young Nordic Journal of Youth Research*, 17(2), 167-189.
- Ruslan, U. A. M. (2000). *Tarbiyah Siyasiyah Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*. Solo: Era Intermedia.
- Saputro, Y. D. (2015). Peran Partai Politik dalam Pendidikan Politik Generasi Muda dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik Wilayah (Studi Di DPD II Partai Golongan Karya Kota Malang Jawa Timur Tahun 2009 - 2014). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 21(1), 34-42. <https://doi.org/10.22146/jkn.6892>.
- Setyadarmodjo, S. H. (2000). Organisasi Partai Politik Dan Demokrasi. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik*, 8(1), 87-94.
- Soedarso. (2006). Pengembangan Sistem Filsafat Pancasila. *Jurnal Filsafat*, 39(1), 42-56.
- Soeprapto, A., Susilasti, D., & Suparno, B. A. (2014). Komunikasi dalam Proses Pendidikan Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum 2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 12(1), 39-54.
- Su'ud. (2014). Pendidikan Politik dalam Persepektif Piagam Madinah. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 21(2), 181-187.
- Sunatra. (2016). *Pendidikan Politik Kewarganegaraan*. Bandung: LEKKAS.
- Surbakti, R. (2007). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Susanto, A. (2013). *Sistem Informasi Akutansi*. Bandung: Lingga Jaya.
- Yuen, T. W. W., & Leung, Y. W. (2009). Political Education: Controversial Issues, Neutrality of Teachers and Merits of Team Teaching. *Citizenship, Social and Economics Education*, 8(2-3), 99-114. <https://doi.org/10.2304/csee.2010.8.2.99>.